

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Dalam UU No. 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, antara lain: keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif, dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian (Nurdita, 2012).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum bernama KPRI, koperasi ini dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri

(KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. KPRI adalah salah satu jenis koperasi yang keberadaannya cukup banyak di Bandar Lampung dan cukup berkembang, sehingga penulis tertarik untuk menjadikan KPRI sebagai objek penelitian skripsi penulis.

Namun sangat disayangkan, perkembangan koperasi yang diharapkan dapat menjadi tonggak utama perekonomian Indonesia mengalami berbagai hambatan misalnya kekurangan dana. Selain itu, kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi, antara lain rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi (Benyamin dalam Putra dan Kurniawati, 2012).

Agar koperasi bisa berkembang dan menjadi seperti yang diharapkan, semestinya memang ada suatu standar yang dibuat untuk mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya manajemen koperasi memiliki tuntunan agar dapat mejadikan koperasi tersebut lebih baik.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunaanya (Tanugraha, 2012).

Seiring dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP diharapkan penerapan standar akuntansi perkoperasian ini dapat memberi gambaran kinerja manajemen di masa lalu serta untuk prospek di masa yang akan datang, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus dan anggota koperasi serta pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut.

Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian studi kasus dengan judul **“Evaluasi atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Apakah koperasi di kota Bandar Lampung, khususnya KPRI telah menerapkan SAK ETAP ke dalam laporan keuangannya?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan ruang lingkup masalah yang hendak diteliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi kota Bandar Lampung, khususnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP ke dalam laporan keuangan koperasi di kota Bandar Lampung, khususnya KPRI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi pembaca, mahasiswa dan pelajar diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi tentang penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK ETAP ke dalam laporan keuangan koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan yang dalam penelitian ini adalah koperasi, manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan bagi manajemen koperasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dalam penelitian ini menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).